

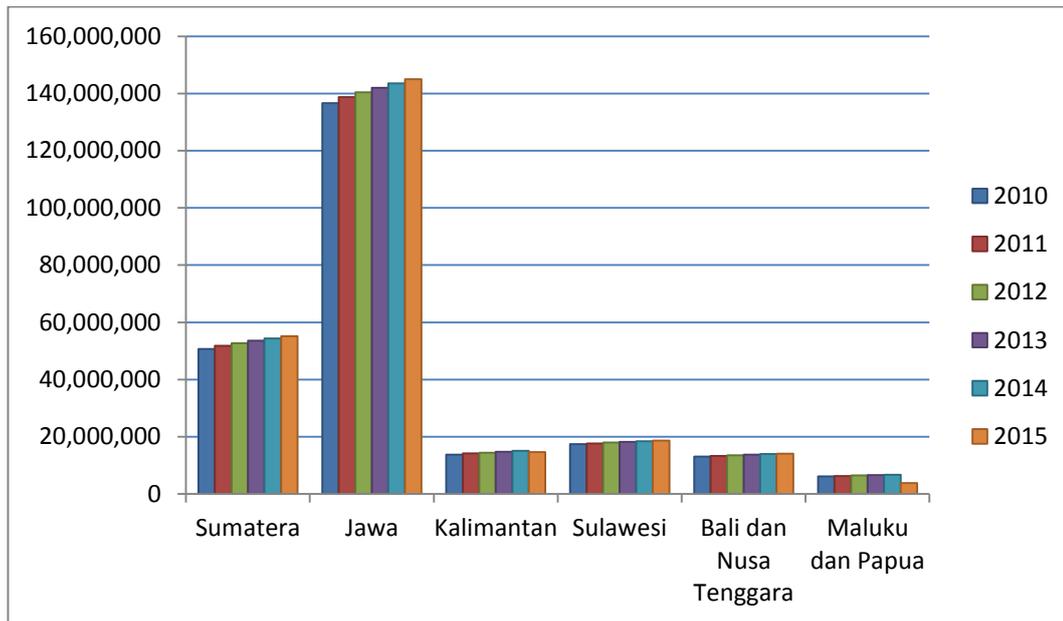
# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kependudukan yang tinggi merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Permasalahan kependudukan yang menjadi tantangan saat ini di antaranya berkaitan dengan besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup padat sehingga kondisi tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Kepadatan penduduk dengan distribusi yang tidak merata mengakibatkan tidak meratanya pembangunan. Umumnya pembangunan daerah lebih berpusat pada daerah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding pedesaan. Pembangunan yang berkelanjutan, secara terus menerus dan berbagai macam fasilitas serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersedia di daerah perkotaan menimbulkan berbagai dampak, salah satunya ketimpangan antara jumlah SDM di perkotaan dengan daerah pedesaan tidak jarang membuat perbedaan *skill* yang dimiliki setiap daerah berbeda. Akhirnya sebagian besar masyarakat cenderung memiliki pola pikir untuk melakukan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain yang dinilai lebih baik agar terciptanya peningkatan kualitas hidup.



Sumber : BPS (diolah oleh Peneliti)

**Gambar I.1**  
**Jumlah Penduduk menurut Pulau Tahun 2010-2015**

Grafik di atas menggambarkan ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia di setiap pulau. Terlihat bahwa Pulau Jawa selalu memiliki jumlah penduduk terbanyak dibanding pulau-pulau lain yang memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit. Jika dibandingkan dengan pulau lain, Pulau Jawa merupakan pulau kecil. Banyaknya jumlah penduduk yang ada, dapat dikatakan bahwa Pulau Jawa menjadi daerah dengan penduduk terpadat di Indonesia. Padatnya jumlah penduduk tidak hanya terjadi karena tingginya tingkat fertilitas dan rendahnya tingkat mortalitas, tetapi juga terjadi karena sebagian masyarakat melakukan perpindahan penduduk menuju Pulau Jawa yang merupakan salah satu daerah tujuan utama dengan beragam latar belakang alasan.

Tingginya tingkat migrasi masuk menyebabkan memunculkan beberapa permasalahan penduduk. Salah satunya adalah berkurangnya lahan hijau di

perkotaan yang dialih fungsikan menjadi perumahan ataupun tempat usaha. Bahkan beberapa diantara para migran memanfaatkan bantaran sungai dan lahan kosong di bawah jembatan layang sebagai tempat tinggal. Pemukiman yang tidak tertata dan terkesan kumuh ini yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, kriminalitas, dan meningkatnya angka pengangguran.

Kelompok masyarakat yang melakukan migrasi selalu bertujuan untuk memperbaiki taraf kehidupan. Mereka beranggapan bahwa daerah asal mereka tidak dapat meningkatkan perekonomian, sehingga perlu melakukan perpindahan ke daerah yang lebih besar. Jika dilihat dari segala hal yang tersedia di perkotaan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat yang melakukan migrasi tidak hanya bertujuan untuk mencari pekerjaan, namun ada pula penduduk yang bermigrasi untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan migrasi secara besar-besaran biasa terjadi setelah perayaan hari raya keagamaan. Masyarakat kota setelah berlibur ke kampung halaman, tidak jarang membawa saudara mereka saat kembali ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan yang lebih baik.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang melakukan migrasi masuk menurut Aris Munandar, yaitu faktor ekonomi, keamanan, keselamatan, pendidikan, dan kepentingan pembangunan.<sup>1</sup> Permasalahan kemajuan perekonomian, upah dan pekerjaan bisa merupakan termasuk faktor ekonomi para migran. Wilayah yang menjadi tempat tinggal migran memiliki tingkat upah yang rendah sehingga mereka mencari daerah yang memiliki upah lebih tinggi. Para migran yang memiliki pendidikan tinggi cenderung menginginkan pekerjaan yang

---

<sup>1</sup> Aris Munandar, *Geografi Penduduk dan Demografi* (Jakarta: Lembaga Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015), p. 63.

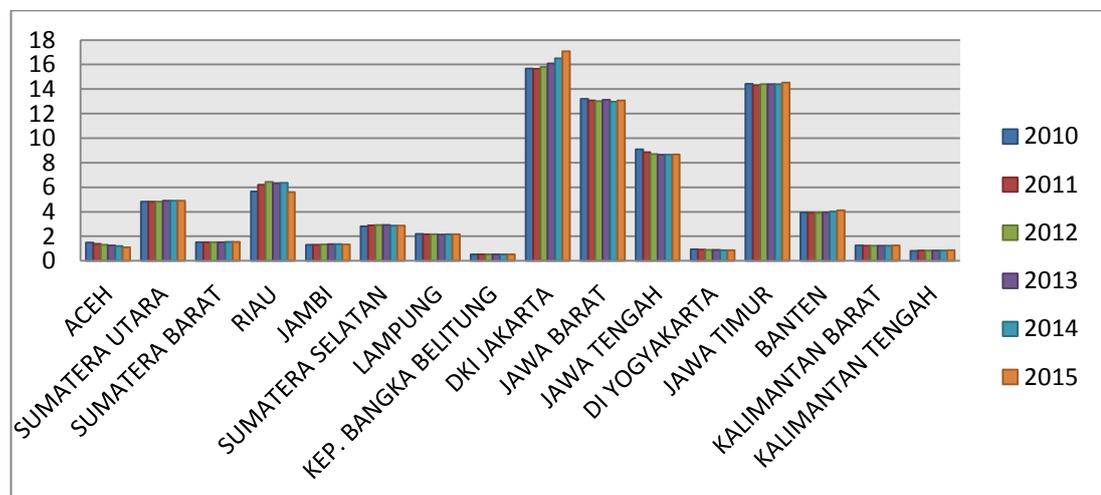
lebih baik dan sebanding dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Beberapa wilayah mempunyai kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja sehingga banyak para pemuda belum memiliki pekerjaan (pengangguran). Sedangkan dalam faktor pendidikan, penduduk melakukan perpindahan karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan alasan lainnya adalah sedang terjadi konflik/peperangan, bencana alam, adanya wabah penyakit, berkurangnya sumber-sumber kehidupan, dan adanya tekanan-tekanan politik, agama, dan suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal.

Setiap daerah memiliki standar penghasilan yang berbeda-beda. Menurut data yang diperoleh dari kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015, provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi terendah pada tahun 2015 adalah Jawa Tengah dan UMP yang paling tinggi dimiliki oleh Ibu Kota Jakarta. Perbedaan tingkat upah inilah yang bisa menjadi faktor utama seseorang melakukan migrasi ke daerah yang memiliki UMP lebih tinggi dibanding daerah asal.

Walaupun tingkat upah bukanlah faktor satu-satunya, tetapi hal ini merupakan salah satu acuan utama. Seseorang tidak akan melakukan migrasi jika UMP yang ada di daerah asal lebih tinggi dibanding daerah tujuan. Pekerja akan membandingkan pendapatan yang diharapkan jika bekerja di daerah tujuan dengan upah yang diterima saat di daerah asal, ditambah tingkat upah yang diterima berhubungan dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Jika ternyata

tingkat pendapatan di daerah asal sama dengan daerah tujuan, atau biaya hidup di daerah tujuan lebih besar dibanding daerah asal sehingga menyebabkan pendapatan bersih yang diterima lebih kecil, maka mereka akan menghentikan arus mobilitasnya atau mengurangi niat untuk melakukan migrasi.

Tujuan seseorang bermigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Para calon migran akan menilai tingkat kemakmuran masyarakat di daerah tujuannya. Tingkat kemajuan masyarakat dinilai dari pertumbuhan perekonomian daerah tersebut. Meningkatnya proses pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Perkembangan PDRB yang dicapai masyarakat seringkali digunakan sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam pembangunan.



Sumber: BPS

**Gambar I.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2010-2015 (dalam persen)**

Grafik di atas menggambarkan tentang pertumbuhan PDRB yang diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Setiap tahun, PDRB selalu mengalami peningkatan.

Terlihat bahwa Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan Timur memiliki peningkatan PDRB lebih lambat dibanding dengan Pulau Jawa. Salah satu penyebabnya adalah karena sebagian besar kegiatan perekonomian berada di Pulau Jawa.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera karena adanya penurunan kinerja lapangan usaha pertanian dan pertambangan. Lapangan usaha pertanian mengalami penurunan investasi, sehingga berdampak pada hasil perkebunan dan pertanian yang terbatas. Penurunan lapangan usaha pertambangan sebagai dampak dari penurunan harga minyak dunia dan permintaan. Sedangkan di Kalimantan disebabkan oleh penurunan sektor pertambangan dan pertanian. Sektor pertambangan mengalami penurunan karena menurunnya ekspor batubara dan ketatnya persaingan batubara dari negara produsen lainnya. Perlambatan dari sektor pertanian karena adanya lahan untuk tanaman sawit juga mengalami kelambatan dalam luas lahan.<sup>2</sup>

Pendidikan merupakan dianggap hal yang berpengaruh dalam menentukan masa depan seseorang. Masyarakat mempercayai bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik kehidupan mereka. Setiap manusia selalu berkeinginan untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin, tak memandang daerah perkotaan atau pedesaan atau pun jenis kelamin. Salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia adalah berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan kualitas penduduk yang semakin baik. Tingginya tingkat pendidikan yang dicapai dapat mencerminkan

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, *Perekonomian Indonesia*, 2016, p. 54-55.

taraf intelektual suatu masyarakat. Jika Indonesia memiliki rata-rata tingkat pendidikan yang tinggi, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat bersaing dengan negara lain karena dapat menghasilkan output tinggi.

Permasalahan yang terjadi adalah sebagian besar dari para migran yang datang tidaklah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan keahlian khusus. Dibandingkan negara tetangga, pendidikan masyarakat Indonesia jauh tertinggal. Hanya sekitar 9% masyarakat yang bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Sementara 49% masyarakat hanya berpendidikan SD ke bawah.<sup>3</sup> Berdasarkan data BPS, ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah. Persentase tenaga kerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) masih di atas 50% sedangkan tenaga kerja berpendidikan tinggi (diploma ke atas) hanya kurang dari 10%. Hal ini dapat terjadi karena mereka yang memiliki pendidikan SMP ke bawah cenderung mau menerima pekerjaan apa pun, sementara mereka yang berpendidikan tinggi cenderung untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa adanya ketimpangan antara tenaga kerja yang berkeahlian dengan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian yang terlalu besar.

Seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki pola pikir untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik, sehingga terdapat keinginan untuk melakukan mobilitas ke kota karena kesempatan kerja yang tersedia lebih banyak, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang diinginkan, serta upah

---

<sup>3</sup>Abubakar (2016) <http://ekbis.sindonews.com/read/1095367/34/tingkat-pendidikan-rendah-hambat-produktivitas-di-tanah-air-1458749204>.

yang diharapkan lebih tinggi. Selain masalah ekonomi, tidak sedikit dari mereka yang berniat untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

**Tabel I.1**  
**Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014**

Pulau	Pendidikan Dasar ( <i>Low</i> )		Pendidikan Menengah ( <i>Middle</i> )	Pendidikan Tinggi ( <i>High</i> )
	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ Sederajat	Diploma/ Sarjana
Sumatera	9.162.867	10.048.336	1.825.666	2.770.193
Jawa	23.631.828	22.229.005	6.246.553	7.494.912
Kalimantan	2.221.715	2.270.802	471.748	732.381
Sulawesi	2.651.269	3.042.885	470.660	1.161.765
Bali dan Nusa Tenggara	1.738.662	2.120.130	415.657	735.905
Maluku dan Papua	8.698.883	1.105.039	210.009	369.015

Sumber: BPS, Penduduk Indonesia 2015 (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel I.1, Pulau Jawa menempati peringkat pertama dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di setiap jenjang pendidikan. Seperti yang dibahas sebelumnya, faktor pendidikan merupakan salah satu alasan seseorang melakukan mobilitas. Provinsi DIY termasuk wilayah yang memiliki tingkat migrasi masuk tertinggi di Indonesia. Sebagai Kota Pendidikan, wilayah ini memiliki daya tarik pada sektor pendidikan. Salah satu alasan para migran memilih DIY sebagai daerah tujuan adalah ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ilmu ekonomi membagi penduduk dalam dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk usia 15 – 60 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Sedangkan bukan tenaga kerja merupakan penduduk usia 0 – 15 tahun dan lebih dari 60 tahun. Dilihat dari pernyataan tersebut, maka pengangguran masuk dalam kategori tenaga kerja.

Pengangguran bukan hanya mereka yang tidak sedang bekerja, namun juga sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran seperti ini disebut dengan pengangguran terbuka. Hanya penduduk yang termasuk angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka, yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga tidak termasuk dalam pengangguran terbuka

Terdapat sejumlah tantangan dalam bidang ketenagakerjaan, tidak saja mencakup penciptaan lapangan kerja yang semakin besar jumlahnya, namun juga peningkatan kualitas ketenagakerjaan yang harus terus diupayakan dari waktu ke waktu. Pengangguran merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Pengangguran memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Tingginya pengangguran usia muda dan pengangguran di beberapa wilayah harus direspon dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai aspirasi mereka. peningkatan utilisasi dan produktivitas penduduk bekerja sebagai upaya penurunan jumlah setengah pengangguran, dan juga peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi area kebijakan yang harus ditindak lanjuti dengan seksama. Kesejahteraan tidak dilihat semata dari sisi kecukupan uang, namun juga alokasi waktu yang memadai bagi keseimbangan hidup bagi diri dan keluarga.

Dalam sepuluh tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan tren yang terus menurun bahkan di tahun 2014 angka pengangguran terbuka sudah mencapai 5,94%. Walaupun dapat dianggap sebagai suatu

keberhasilan, pengangguran di Indonesia masih merupakan suatu persoalan bagi kelompok tertentu, terutama pada kelompok umur muda (15–24 tahun) yang tingkat pengangguran terbukanya pada 2014 masih sebesar 22,20%.<sup>4</sup>

Tingkat pengangguran setiap negara dihitung berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja yang dilakukan oleh masing-masing negara dengan waktu (bulan) pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam hal penghitungan tingkat pengangguran tersebut, setiap negara menggunakan batasan usia kerja yang berbeda-beda. Umumnya batas bawah usia yang digunakan 15 tahun, tapi ada juga yang menggunakan usia 16 tahun, 14 tahun, 13 tahun bahkan 10 tahun. Pada umumnya tidak ada batas atas usia kerja namun demikian, di beberapa negara membatasi sampai usia 64 tahun, 66 tahun, 72 tahun, dan 74 tahun.

Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah adanya kesenjangan yang cukup besar antara tersedianya kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Atau dapat dikatakan kesempatan kerja yang tersedia tidak dapat menampung atau mempekerjakan tenaga kerja yang ada, terlebih jika mereka tidak terampil atau berpendidikan rendah. Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja ini dapat berdampak pada tingkat perpindahan tenaga kerja (migrasi) secara permanen atau sementara.

Seseorang memutuskan untuk pindah tempat tinggal berkaitan erat dengan suatu proses untuk mempertahankan hidup. Salah satu cara seseorang untuk mempertahankan hidup adalah dengan bekerja untuk mendapatkan penghasilan.

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka*, p.31.

Pengangguran bukanlah salah satu permasalahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan. Permasalahan lainnya adalah mengenai kesempatan kerja yang tidak merata di Indonesia. Saat ini Indonesia sedang mengalami perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor non pertanian karena sebagian dari masyarakat lebih memilih untuk bekerja di sektor non pertanian dibandingkan di sektor pertanian. Sektor pertanian dianggap kurang mampu memberikan pendapatan yang memadai untuk hidup secara layak dan masih jauh di bawah tingkat upah sektor non pertanian.

Laju pertumbuhan sektor industri di kota dan kesempatan kerja lainnya cenderung membuat masyarakat untuk berpindah ke daerah perkotaan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang tersedia. Selain itu juga terjadi karena lambatnya pergerakan sektor pertanian yang berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima tenaga kerja. Kesempatan kerja merupakan lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Umumnya, jumlah lowongan pekerjaan banyak terdapat di daerah perkotaan. Didukung dengan semakin baik sarana transportasi dan semakin mudahnya memiliki kendaraan pribadi merupakan daya tarik dalam migrasi.

**Tabel I.2**  
**Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan**  
**Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Tahun 2014-2015**

Provinsi	2014			2015		
	Pencari Kerja	Lowongan Kerja	Penempatan	Pencari Kerja	Lowongan Kerja	Penempatan
Aceh	11.493	2.534	339	12.628	2.483	402
Sumatera Utara	8.041	2.053	1.673	8.834	2.233	1.992
Sumatera Barat	3.775	651	609	4.134	671	723
Riau	21.599	5.088	404	23.623	5.081	479
Jambi	11.448	4.398	3.508	12.400	4.308	4.161
Sumatera Selatan	20.993	4.921	6.757	22.655	4.835	8.014
Lampung	9.928	1.489	84	10.815	1.523	100
Bangka Belitung	9.292	290	82	10.185	228	97
DKI	26.509	10.860	10.726	28.761	10.699	12.722
Jawa Barat	176.220	123.515	110.302	190.242	127.131	130.994
Jawa Tengah	208.946	145.827	106.205	227.615	147.376	126.052
DIY	15.326	13.797	9.244	16.711	14.091	10.989
Jawa Timur	295.495	247.180	185.801	325.728	258.712	220.771
Banten	99.216	47.533	39.944	108.339	47.973	47.228
Kalimantan Barat	8.538	1.938	125	9.350	1.922	152
Kalimantan Tengah	9.769	3.454	2.028	10.575	3.290	2.402

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel tersebut, lowongan kerja tidak sebanding dengan para pencari kerja. Tenaga kerja yang lolos seleksi sangat berbanding jauh dengan para pencari kerja. Walaupun lowongan kerja di setiap provinsi umumnya selalu mengalami peningkatan, namun tetap tidak dapat memenuhi banyaknya pencari kerja karena jumlah pencari kerja juga akan bertambah dari tahun ke tahun di seluruh provinsi. Jumlah pencari kerja akan selalu lebih banyak dibandingkan lowongan kerja yang tersedia dan penempatan tenaga kerja.

**Tabel I.3**  
**Provinsi Asal Migran di Masing-masing Provinsi Tahun 2013**

<b>Tempat Tinggal Sekarang</b>	<b>Tempat Tinggal 5 Tahun Lalu</b>	<b>%</b>
Aceh	Sumatera Utara	45,8
	DKI Jakarta	10,0
	Lampung	6,1
Sumatera Utara	Riau	26,4
	DKI Jakarta	12,9
	Jawa Barat	11,2
Sumatera Barat	Riau	26,3
	DKI Jakarta	13,7
	Sumatera Utara	12,8
Riau	Sumatera Utara	43,7
	Sumatera Barat	18,3
	Jawa Barat	5,9
Jambi	Sumatera Selatan	17,0
	Sumatera Utara	15,3
	Sumatera Barat	14,5
Sumatera Selatan	Lampung	26,2
	Jawa Barat	16,7
	Jawa Tengah	14,3
Lampung	Jawa Barat	16,7
	Banten	13,3
	Sumatera Selatan	13,3
Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera Selatan	29,9
	Lampung	14,8
	Jawa Barat	11,2

<b>Tempat Tinggal Sekarang</b>	<b>Tempat Tinggal 5 Tahun Lalu</b>	<b>%</b>
DKI Jakarta	Jawa Barat	36,5
	Jawa Tengah	28,2
	Banten	11,0
Jawa Barat	DKI Jakarta	33,8
	Jawa Tengah	23,1
	Banten	9,9
Jawa Tengah	DKI Jakarta	25,4
	Jawa Barat	18,5
	Jawa Timur	9,9
DIY	Jawa Tengah	33,8
	DKI Jakarta	10,3
	Jawa Timur	10,0
Jawa Timur	Jawa Tengah	19,0
	DKI Jakarta	10,2
	Kalimanta Timur	7,5
Banten	DKI Jakarta	33,1
	Jawa Barat	21,8
	Jawa Tengah	15,0
Kalimantan Barat	Jawa Barat	26,9
	Jawa Timur	11,9
	Jawa Tengah	8,8
Kalimantan Tengah	Jawa Tengah	36,5
	Jawa Timur	20,9
	Kalimantan Barat	5,2

Sumber: BPS, Profil Migran 2013

Teori migrasi menurut Ravenstein mengungkapkan tentang perilaku mobilitas penduduk (migrasi) yang disebut dengan Hukum-Hukum Migrasi yang

masih relevan sampai saat ini, salah satunya adalah para migran cenderung memilih daerah tujuan yang terdekat dengan tempat tinggal.<sup>5</sup>

Berdasarkan tabel I.3, pada tahun 2013 penduduk migran yang tinggal di Jawa Barat sebagian besar berasal dari DKI Jakarta (33,8%). Demikian juga migran di Banten dan Jawa Tengah sebagian besar berasal dari DKI Jakarta, dengan persentase masing-masing sebesar 33,1%, dan 25,4%. Sedangkan migran yang tinggal di DIY, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah sebagian besar berasal dari Jawa Tengah dengan persentase masing-masing sebesar 33,8%, 19% dan 36,5%. Berdasarkan pola yang terjadi, pada umumnya penduduk yang melakukan migrasi memilih tujuan yang dekat dengan tempat tinggal asalnya.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, migran laki-laki lebih banyak dibandingkan migran perempuan. Perempuan cenderung lebih sedikit melakukan perpindahan. Kemungkinan hal ini berkaitan dengan peran dan tugasnya dalam rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk berpindah. Jika perpindahan disebabkan karena pekerjaan, maka perempuan cenderung tidak pindah pekerjaan karena rata-rata perempuan sudah merasa cukup dengan pekerjaan yang ada. Alasan lainnya adalah karena perempuan bukan pencari nafkah utama dalam keluarga. Jika memang keadaan memaksa mereka untuk berpindah, maka mereka akan mencari pekerjaan di wilayah yang sama dengan tempat tinggal mereka saat ini.

---

<sup>5</sup> Kartomo Wirohardjo, *Dasar-dasar Demografi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), p.120.

**Tabel I.4**  
**Migrasi Masuk menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015**

<b>Provinsi</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Aceh	21.844	18.772
Sumatera Utara	68.295	74.479
Sumatera Barat	73.960	64.866
Riau	107.469	107.881
Jambi	36.907	30.667
Sumatera Selatan	37.473	38.287
Lampung	39.085	42.115
Bangka Belitung	15.944	16.473
DKI	227.397	271.704
Jawa Barat	381.432	369.567
Jawa Tengah	269.659	248.444
DIY	99.546	108.711
Jawa Timur	164.258	151.285
Banten	165.150	159.322
Kalimantan Barat	20.269	17.090
Kalimantan Tengah	42.927	35.469

Sumber: BPS, Statistik Migrasi Indonesia 2015

Berdasarkan tabel I.4, provinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian barat rata-rata memiliki tingkat migrasi lebih tinggi untuk penduduk laki-laki dibandingkan perempuan. Seperti Provinsi Aceh dengan tingkat migran laki-laki 21.844 jiwa dan perempuan 18.772 jiwa atau sekitar 53,78% laki-laki dan 46,22% perempuan. Hal ini juga terjadi pada provinsi lainnya dengan tingkat migran laki-laki lebih banyak dibanding perempuan yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Namun tidak berlaku untuk provinsi lain yang memiliki tingkat migran perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki. Provinsi tersebut antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jakarta, dan Jawa Tengah. Kejadian ini mungkin terjadi karena semakin

meningkatnya pendidikan wanita tersebut. Selain itu juga dapat terjadi karena para perempuan yang telah menikah cenderung mengikuti suami.

Umur merupakan karakteristik penduduk yang paling melekat. Struktur umur mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku demografis maupun sosial ekonomi. Ananta dan Anwar menjelaskan bahwa pola bermigrasi penduduk berbeda menurut kelompok umur, dimana peluang penduduk kelompok umur muda dan umur produktif untuk melakukan migrasi lebih besar.<sup>6</sup>

**Tabel I.5**  
**Persentase Migran Masuk menurut Provinsi dan Kelompok Umur**  
**Tahun 2013**

Provinsi	Golongan Umur						
	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
<b>Aceh</b>	10,3	12,3	43,9	23,8	7,1	1,6	1,0
<b>Sumatera Utara</b>	14,1	21,5	28,0	25,5	6,9	2,6	1,4
<b>Sumatera Barat</b>	14,4	16,4	28,8	24,3	10,7	4,0	1,4
<b>Riau</b>	9,7	15,6	42,5	21,2	6,5	2,9	1,6
<b>Jambi</b>	10,9	15,8	36,9	22,5	7,9	2,8	3,2
<b>Sumatera Selatan</b>	10,2	16,2	36,6	23,2	8,1	3,9	1,8
<b>Lampung</b>	12,1	12,0	34,3	28,6	8,0	1,5	3,5
<b>Bangka Belitung</b>	7,3	14,0	42,3	18,8	7,0	5,0	5,6
<b>DKI</b>	3,8	20,8	45,7	19,0	5,9	3,5	1,3
<b>Jawa Barat</b>	4,9	16,0	40,6	23,3	9,4	3,1	2,7
<b>Jawa Tengah</b>	7,7	12,1	36,0	25,4	11,4	5,1	2,3
<b>DIY</b>	4,8	22,2	51,1	13,4	5,8	1,3	1,4
<b>Jawa Timur</b>	7,7	14,1	29,2	30,4	11,0	4,6	3,0
<b>Banten</b>	6,8	15,1	45,7	20,4	6,2	3,6	2,2
<b>Kalimantan Barat</b>	12,8	17,9	38,1	16,8	8,6	5,4	0,4
<b>Kalimantan Tengah</b>	9,5	12,5	38,3	25,3	9,2	2,7	2,5

Sumber: BPS, Profil Migran 2013

Berdasarkan tabel I.5, sebagian besar penduduk yang melakukan migrasi adalah mereka yang berada di dalam kelompok umur 20-29 tahun, kemudian disusul oleh kelompok umur 30-39 tahun, 10-19 tahun, 40-49 tahun, 5-9 tahun,

<sup>6</sup> Aris Ananta dan Anwar Evi, *Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja di Indonesia 1995 – 2025* (Jakarta: Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1994), p. 37.

50-59 tahun, dan 60 tahun ke atas. Tingginya tingkat migran dengan kelompok umur 20-29 tahun terjadi karena dalam usia ini manusia mengalami masa produktif sehingga cenderung untuk melakukan migrasi. Seperti Provinsi Riau dengan tingkat persentase 42,5% untuk kelompok umur 20-29. Sedangkan untuk umur 60 tahun ke atas memiliki tingkat paling rendah dibanding kelompok umur yang lain terjadi karena semakin tua, semakin kecil kecenderungan untuk berpindah. Mereka telah nyaman dengan tempat tinggalnya. Rendahnya penduduk yang melakukan migrasi dengan kelompok umur 60 tahun ke atas juga terjadi pada Provinsi Kalimantan Barat dengan tingkat persentase 0,4%.

Faktor lain yang berhubungan dengan mobilitas penduduk adalah status pernikahan. Menurut Mantra, penduduk yang tergolong dalam kelompok usia muda dan belum menikah lebih banyak dibanding penduduk yang telah menikah.<sup>7</sup> Namun teori lain mengungkapkan bahwa penduduk yang telah menikah lebih banyak dibanding mereka yang belum menikah. Menurut Ananta, Anwar, dan Miranti, perempuan yang berstatus menikah lebih cenderung melakukan migrasi. Rata-rata mereka pindah tempat dengan alasan mengikuti suami.<sup>8</sup> Teori tersebut sejalan dengan data yang tersaji.

**Tabel I.6**  
**Persentase Migran Masuk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Perkawinan Tahun 2013**

Provinsi	Status Perkawinan			
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
Aceh	34,9	63,3	-	1,8

<sup>7</sup> Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p.179.

<sup>8</sup> Aris Ananta., Evi Nurvidya Anwar, Riyana Miranti, *Age-Sex Pattern of Migrants and Movers: A Multilevel Analysis on an Indonesian Data Set*, Asian Meta centre Research Paper Series No. 1, June 2000, p.33 (<http://www.populationasia.org/Publications/RP/AMCRP1.pdf>) diakses 07 November 2017.

<b>Sumatera Utara</b>	36,9	58,1	2,2	2,8
<b>Sumatera Barat</b>	33,8	62,4	1,5	2,3
<b>Riau</b>	38,6	58,0	1,6	1,8
<b>Jambi</b>	35,0	62,0	0,7	2,3
<b>Sumatera Selatan</b>	33,8	64,4	0,8	1,0
<b>Lampung</b>	20,3	75,2	0,5	4,0
<b>Bangka Belitung</b>	30,6	63,9	2,5	3,0
<b>DKI</b>	46,3	48,9	2,9	1,9
<b>Jawa Barat</b>	36,1	59,5	2,5	1,9
<b>Jawa Tengah</b>	24,6	71,5	2,1	1,8
<b>DIY</b>	63,2	34,9	0,5	1,4
<b>Jawa Timur</b>	28,4	65,8	2,7	3,1
<b>Banten</b>	38,7	56,3	2,7	2,3
<b>Kalimantan Barat</b>	37,1	57,6	2,4	2,9
<b>Kalimantan Tengah</b>	26,9	70,4	1,1	1,6

Sumber: BPS, Profil Migran 2013

Status pernikahan akan mempengaruhi seseorang melakukan migrasi. Tabel I.6 menunjukkan bahwa berdasarkan status pernikahan, penduduk yang telah menikah memiliki persentase tertinggi, lalu diikuti oleh penduduk yang belum menikah, cerai mati, dan cerai hidup. Tingkat migran yang berstatus menikah paling tinggi adalah Lampung (75,2%), Jawa Tengah (71,5%), dan Kalimantan Tengah (70,4%). Namun ada pula provinsi yang memiliki tingkat migran yang berstatus belum menikah tertinggi yaitu Yogyakarta (63,2%) dan DKI Jakarta (46,3%).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan migrasi masuk. Dari sebagian faktor tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan kesempatan kerja memiliki pengaruh terhadap tingkat migrasi masuk di Wilayah Indonesia bagian Barat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah bahwa seseorang melakukan migrasi masuk ke suatu daerah diantaranya:

1. Perbedaan upah minimum provinsi di daerah asal dengan wilayah Indonesia bagian barat
2. Tingginya PDRB di Wilayah Indonesia bagian Barat
3. Tingginya latar belakang pendidikan yang dimiliki para migrasi
4. Tingginya pengangguran di daerah asal
5. Tingginya kesempatan kerja di Wilayah Indonesia bagian Barat
6. Jarak yang dekat dengan wilayah Indonesia bagian barat
7. Tingginya migran berjenis kelamin laki-laki
8. Tingginya kelompok umur produktif
9. Tingginya jumlah para migran yang berstatus menikah

#### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ternyata masalah migrasi yang terjadi di Wilayah Indonesia bagian Barat memiliki faktor yang luas. Maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah pengaruh antara upah minimum provinsi, PDRB, dan kesempatan kerja terhadap tingkat migrasi masuk di Wilayah Indonesia bagian Barat tahun 2010-2015.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ada pengaruh antara upah minimum provinsi terhadap tingkat migrasi masuk di Wilayah Indonesia bagian Barat.

2. Ada pengaruh antara PDRB terhadap tingkat migrasi masuk di Wilayah Indonesia bagian Barat.
3. Ada pengaruh antara kesempatan kerja terhadap tingkat migrasi masuk di Wilayah Indonesia bagian Barat.
4. Ada pengaruh antara upah minimum provinsi, PDRB, dan kesempatan kerja terhadap tingkat migrasi masuk di Wilayah Indonesia bagian Barat.

**E. Manfaat Penelitian**

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak Universitas Negeri Jakarta, serta ikut berperan dalam penambahan informasi dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam menanggulangi tingkat migrasi masuk yang berdampak buruk dan mengalami peningkatan tajam.